



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN NOMOR 4 TAHUN 2023

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023, kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN

A. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi melalui seleksi terbuka sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	ESELON
1	Kepala Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	II.a
2	Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi	II.a
3	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	II.a

B. Deskripsi Tugas Jabatan

1. Kepala Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. mengevaluasi hasil pengelolaan administrasi perencanaan dan pengolahan data pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. mengevaluasi hasil pengelolaan administrasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. mengevaluasi hasil pengelolaan administrasi pelaporan dan kearsipan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- d. evaluasi pelaksanaan administrasi Biro.

2. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi

Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan hukum, kerja sama, pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. mengevaluasi hasil penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi, diseminasi hukum, advokasi, dan administrasi adjudikasi;
- b. mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja sama;
- c. mengevaluasi hasil pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- d. evaluasi pelaksanaan administrasi Biro.

3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasi penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan pusat, fasilitasi pengelolaan keuangan perwakilan, akuntansi, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. mengevaluasi hasil penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pemantauan dan evaluasi;
- b. mengevaluasi hasil pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- c. mengevaluasi hasil fasilitasi pengelolaan keuangan perwakilan; dan
- d. evaluasi pelaksanaan administrasi Biro.

II. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENDAFTARAN

A. Persyaratan

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tingkat I atau Golongan (IV/b);
3. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
4. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
5. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun per tanggal **1 September 2023**;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
7. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2021 dan tahun 2022);
8. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
9. Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti rangkaian Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
10. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif dari partai politik;
12. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
13. Memiliki kompetensi, kepemimpinan, dan integritas yang dibutuhkan;
14. Sehat jasmani dan kejiwaan/rohani;
15. Berkomitmen untuk menandatangani Pakta Integritas;
16. Telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Tahun 2022;
17. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani Pelamar dan bermeterai Rp. 10.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia;
18. Mampu bekerja sama dan bersosialisasi dengan tim dengan berbagai macam kultur; dan
19. Memiliki etos kerja dan mampu bekerja di bawah tekanan.

B. Tata Cara Pendaftaran dan Kelengkapan Dokumen Lamaran

1. Pengumuman pendaftaran Seleksi Terbuka ditayangkan melalui tautan: <https://ombudsman.go.id/pengumuman>.
2. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui tautan <https://seleksi.ombudsman.go.id/seleksijpt> (dihimbau agar pelamar melakukan proses pendaftaran menggunakan PC/laptop). Periode pendaftaran seleksi dimulai pada tanggal **11 Mei 2023 s.d. 25 Mei 2023**.
3. Pelamar wajib mengisi data diri dengan benar dan mengunggah dokumen kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan.
4. Dokumen kelengkapan administrasi yang perlu diunggah (**dalam hasil scan**) sebagai berikut:
 - a. Asli Surat Lamaran yang ditujukan ke Ketua Panitia Seleksi yang ditandatangani pelamar dan bermeterai Rp. 10.000,- (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
 - b. Pasfoto terbaru ukuran 4x6 berwarna (format file *jpeg/jpg*, maksimal 500 KB).
 - c. Daftar Riwayat Hidup yang memuat data pribadi, pengalaman riwayat jabatan, riwayat pendidikan, nomor HP, alamat email (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
 - d. Asli Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan bermeterai Rp.10.000,- (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
 - e. Asli Surat Keterangan Atasan Langsung yang menyatakan tidak pernah menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang dibubuhi Meterai Rp. 10.000,- (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
 - f. Asli Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif dari partai politik dan bermeterai Rp. 10.000,- (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);
 - g. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani Pelamar dan bermeterai Rp. 10.000,- (format file *pdf*, maksimal 500 KB, dapat diunduh pada tautan pengumuman pendaftaran);

- h. Asli Ijazah pendidikan dengan strata pendidikan tertinggi (D-IV, S-1, S-2 dan/atau S-3 jika ada). Bagi Pelamar Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (dijadikan dalam 1 (satu) file *pdf*, maksimal 1 MB);
- i. Asli Surat Keputusan Pengangkatan dalam Pangkat Terakhir minimal Pembina Tingkat I atau Golongan (IV/b) (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- j. Asli Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural atau Fungsional dalam Jabatan Terakhir (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- k. Asli sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklat PIM Tk. III) dan/atau Tingkat II (Diklat PIM Tk. II), serta sertifikat diklat teknis maupun fungsional yang relevan dengan jabatan yang dilamar (format file *pdf*, maksimal 1 MB);
- l. Asli Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2021 dan Tahun 2022 (format file *pdf*, maksimal 1 MB);
- m. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah, yang terdiri atas:
 - 1) Surat Keterangan Sehat Jasmani (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
 - 2) Surat Keterangan Sehat Kejiwaan/Rohani dari Dokter Spesialis (format file *pdf*, maksimal 500 KB); dan
 - 3) Surat Keterangan Bebas Narkoba (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- n. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- o. Asli NPWP (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- p. Bukti penyerahan SPT Tahun 2022 (format file *pdf*, maksimal 500 KB);
- q. Bukti laporan penyerahan LHKASN atau LHKPN Tahun 2022 (format file *pdf*, maksimal 500 KB).

**Penggunaan 1 (satu) meterai hanya untuk 1 (satu) surat, tidak boleh digunakan lebih dari 1 (satu) surat.*

- 5. Dokumen yang diunggah dapat dibaca dan dipahami dengan jelas serta merupakan hasil pindai (*scan*) dari dokumen asli sebagaimana layaknya dokumen, bukan merupakan hasil foto dari dokumen tersebut. Dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dan tidak dapat dipahami dengan jelas, tidak akan diproses.
- 6. Batas waktu unggah dokumen kelengkapan administrasi paling lambat pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 24.00 WIB. Unggah dokumen kelengkapan

administrasi yang diterima melewati batas waktu tersebut tidak akan diproses.

7. Proses pendaftaran wajib dilakukan dengan mengisi data diri dan mengunggah seluruh dokumen kelengkapan administrasi pada tautan sebagaimana dimaksud pada angka 4. Pelamar yang tidak mengisi data diri dan/atau tidak mengunggah seluruh dokumen kelengkapan administrasi pada tautan sebagaimana dimaksud pada angka 4 maka dinyatakan tidak mengikuti proses pendaftaran seleksi.
8. Bagi peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2023 yang telah lolos 3 (tiga) terbaik yang diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, wajib menyampaikan dokumen fisiknya kepada Panitia Seleksi. Teknis penyampaian akan disampaikan pada pengumuman terkait.

C. Jadwal Tentatif Kegiatan

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Penerimaan lamaran	11 - 25 Mei 2023
2.	Pengumuman hasil Seleksi Administrasi	31 Mei 2023
3.	Seleksi Penulisan Makalah	9 Juni 2023
4.	Pengumuman hasil ujian makalah	15 Juni 2023
5.	<i>Assessment Center</i>	26 - 27 Juni 2023
6.	Penelusuran Rekam Jejak	9 - 30 Juni 2023
7.	Seleksi Wawancara dan Presentasi	3 - 4 Agustus 2023
8.	Pengumuman hasil akhir seleksi	23 Agustus 2023

D. Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi
 - a. Panitia melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
 - b. Selanjutnya panitia menetapkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.
2. Seleksi Penulisan Makalah
 - a. Penyusunan makalah dilaksanakan di depan Panitia Seleksi.
 - b. Selanjutnya Sekretariat Panitia Seleksi akan menyampaikan hasil pembuatan makalah kepada Panitia Seleksi dan mengumumkan hasilnya di *website* Ombudsman.

- c. Peserta yang dinyatakan lulus tahapan Penulisan Makalah dan berhak mengikuti tahapan *Assessment Center* adalah peserta dengan nilai tertinggi (dengan catatan paling banyak 5 (lima) kali alokasi formasi jabatan yang dilamar).
3. *Assessment Center*
 - a. Penilaian menggunakan metode *Assessment Center* (tertulis, diskusi, dan wawancara) dilaksanakan di Lembaga *Assessment Center* yang akan disampaikan pada pengumuman selanjutnya.
 - b. Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan peserta yang lulus seleksi Asesmen, untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
 - c. Peserta yang hasil tahapan *Assessment Center* adalah "*Tidak lulus*"/*"Tidak Disarankan"*/ istilah lain yang sejenis, dinyatakan tidak lulus tahapan *Assessment Center* dan dinyatakan tidak berhak untuk mengikuti tahapan Seleksi Wawancara dan Presentasi.
 4. Seleksi Wawancara dan Presentasi
 - a. Peserta menyusun paparan dan melaksanakan presentasi paparannya di depan Panitia Seleksi.
 - b. Panitia Seleksi akan melakukan wawancara akhir dan dapat mengundang *user* sesuai jabatan.
 5. Penyerahan hasil kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
Ketua Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) calon pejabat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Ombudsman Republik Indonesia.

Seluruh hasil pelaksanaan tahapan seleksi akan diumumkan langsung kepada peserta yang lulus dalam tahapan seleksi dan/atau melalui *website* Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat www.ombudsman.go.id.

E. Ketentuan Lain-lain

1. Pelamar **hanya memilih 1 (satu) jabatan** yang akan dilamar.
2. Dokumen/berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
3. **Pelamar tidak diperkenankan untuk melakukan pendaftaran secara berulang atau lebih dari 1 (satu) kali.** Pelamar wajib memastikan bahwa dokumen yang diunggah adalah dokumen kelengkapan administrasi sesuai dengan yang dipersyaratkan.
4. Panitia Seleksi **tidak mengenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun** kepada peserta selama proses seleksi. Ombudsman Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun

oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Ombudsman Republik Indonesia atau Panitia Seleksi.

5. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama proses seleksi ditanggung oleh peserta.
6. Seluruh dokumen administrasi yang disampaikan menjadi hak milik Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia.
7. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
8. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar, maka Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia berhak membatalkan hasil seleksi.
9. Dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif pelaksanaan tahapan seleksi dapat menghubungi Tim Sekretariat Seleksi ke email seleksijpt@ombudsman.go.id.

Catatan:

Jadwal kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah dan setiap perubahan jadwal akan diumumkan melalui *website* Ombudsman RI www.ombudsman.go.id, untuk itu para peserta seleksi agar aktif mengakses *website* dimaksud. Kelalaian karena tidak mengikuti perkembangan informasi seleksi menjadi tanggungjawab peserta.

Jakarta, 04 Mei 2023
Ketua Panitia Seleksi,

#

Robert Na Endi Jaweng